

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Administrasi Pembangunan**

Menurut **P Siagian (2001:4)** Administrasi pembangunan adalah meliputi dua pengetahuan yaitu tentang administrasi dan pembangunan. Administrasi adalah seluruh proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern. Maka tidak akan ada suatu negara yang akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai jenis kegiatan pembangunan.

Pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditumpuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Apabila diamati secara cermat, maka muncul dipermukaan pembangunan paling sedikit 7 ide pokok. Pertama: pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan “bagian” dari suatu yang bersifat tanpa akhir (never ending). Banyak cara yang dibutuhkan dalam pentahapan tersebut, seperti jangka waktu, biaya, atau

hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh. Kedua : Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai suatu hal yang akan dilaksanakan. Ketiga : pembangunan dilaksanakan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang maupun jangka pendek, merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu dimasa mendatang. Keempat : rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan, pertumbuhan dimaksud sebagai peningkatan kemampuan suatu bangsa harus bersikap antisipatif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari satu jangka waktu ke jangka waktu yang lain. Kelima : pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas disini diartikan antara lain sebagai cara hidup yang baru yang lebih baik dari yang sebelumnya, cara pikir yang rasional, dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel. Keenam : modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan per definisi bersifat multidimensional. Artinya , modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketujuh : semua hal yang telah disinggung diatas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain didunia karena mampu menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara lainnya.

Pembangunan berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermamfaat dan berguna bagi masyarakat setempat, selain itu juga resiko atau cost yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan ini akan ditanggung

juga oleh masyarakat setempat. Berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang merupakan bagian dalam perencanaan program pembangunan dapat di bentuk atau diciptakan. Hal ini sangat tergantung pada kondisi masyarakat setempat, baik kondisi sosial, budaya, dan ekonomi.

Menurut **Riady (2003:322)** langkah-langka di dalam mengajak peran serta masyarakat secara penuh didalam pembangunan dapat dilakukan dengan jalan:

- a. Merumuskan dan menampung keinginan masyarakat yang akan di wujudkan melalui upaya pembangunan.
- b. Dengan dibantuoleh pendamping atau narasumber atau lembaga advokasi masyarakat, dibuatkan alternatif perumusan dari berbagai keinginan tersebut.
- c. Merancang pertemuan seluruh masyarakat yang berminat dan berkepentingan yang membicarakan cost dan benefit dari pelaksanaan pembangunan ini.
- d. Proses pelaksanaan program pembangunan dan pembiayaan pembangunan serta rencana pelaksanaan pembangunan dilangsungkan beberapa kali dan melibatkan seluruh intansi maupun pameran pembangunan yang terkait.
- e. Melaksanakan program pembangunan disertai dengan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Menurut **Riady (2003:336)** perencanaan pembangunan daerah dalam konteks manajemen pembangunan merupakan fungsi pertama yang harus dilakukan. Perencanaan pembangunan daerah yang dikembangkan harus memiliki prinsip-prinsip pembangunan antara lain:

- a. Perencanaan pembangunan daerah harus memiliki landasan filosofi yang kuat dan mengakar dalam kultur/budaya masyarakat yang ada di daerah.
- b. Perencanaan pembangunan harus bersifat komprehensif, holistik, atau menyeluruh, sehingga mampu membangun aspek-aspek yang akan menjadi satu kesatuan dalam pembangunan.
- c. Perencanaan pembangunan daerah harus mengakomodasikan keadaan struktur ruang dari wilayah perencanaannya, seperti pusat perkotaan, pedesaan, dan lain sebagainya.
- d. Perencanaan pembangunan daerah harus bersifat menyokong/memperkuat perencanaan pembangunan secara nasional. Perencanaan pembangunan daerah harus dilaksanakan secara harmonis dan mendukung proses pembangunan secara nasional dengan tetap berlandaskan pada kekuatan, potensi, dan kebutuhan daerah itu sendiri.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan sangat menentukan tercapainya hasil perencanaan yang baik. Karena masyarakat sebagai unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang dibutuhkannya. Disamping masyarakat seharusnya diberi kepercayaan oleh pemerintah dalam pembangunan, sehingga mereka merasa bertanggungjawab dan merasa memiliki program pembangunan tersebut.

## 2.2 Pengertian distribusi

Menurut pengertian ekonomi, distribusi merupakan penambahan kegunaan waktu, tempat dan pemilikan barang. Definisi ini juga mencakup tentang transportasi, pergudangan, pengendalian persediaan.

Distribusi adalah pergerakan barang dari distributor hingga kepelanggannya **(David 22 :2009)**.

Distribusi Bantuan Logistik adalah suatu sistem penyaluran dan atau pembagian bantuan logistik dalam rangka penanggulangan bencana dari daerah asal ke daerah tujuan sampai pada sasaran yang dituju.

Angkutan sebagai penunjang pembangunan ekonomi, Pembangunan ekonomi membutuhkan jasa angkutan yang cukup serta memadai. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi diperlukan kapasitas angkutan yang optimum. Namun perlu di perhatikan bahwa penentu kapasitas dan tingkat investasi bukan merupakan hal yang mudah.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pengembangan ekonomi adalah Meningkatkan pendapatan nasional, disertai dengan distribusi yang merata antara penduduk, bidang-bidang usaha dan daerah-daerah. Meningkatkan jenis dan jumlah barang jadi dan jasa yang dapat dihasilkan para konsumen, industri dan pemerintah.

Manajemen distribusi menggambarkan strategi yang searah dengan visi misi perusahaan, berdasarkan pada berbagai keputusan yang berkaitan

untuk memindahkan barang-barang secara fisik dan non fisik guna mencapai tujuan perusahaan dan berada didalam kondisi lingkungan tertentu (**Walters, 1977**).Jadi manajemen distribusi merupakan sebuah pendekatan yang berorientasi pada keputusan yang berarti bahwa perhatian diarahkan pada pengembangan kebijakan yang efektif mulai dari perencanaan, mengorganisasikan, mengoperasikan, dan mengendalikan, tidak hanya pada deskripsi tentang bagaimana sebuah saluran beroperasi saja.

Salah satu fungsi saluran distribusi yaitu fungsi penyediaan fisik yang mana fungsi ini berkaitan dengan proses pemindahan barang secara fisik dari produsen ke konsumen. Ada empat macam sub fungsi dalam penyediaan fisik yang meliputi : pengumpulan, penyimpanan, pemilihan dan pengangkutan/transportasi.

Pengangkutan merupakan fungsi pemindahan barang dari tempat barang dihasilkan ketempat barang dikonsumsi. Dalam kaitannya dengan transportasi, anggota saluran distribusi perlu memperhatikan keputusan pengangkutan ( **Kotler, 2002**). Pada umumnya saluran distribusi memilih suatu model transportasi berdasarkan criteria berikut : Biaya, waktu transit, keterandalan, kemampuan, jangkauan dan penelusuran.

### **2.3 Pengertian logistik**

Logistik adalah pemindahan, penyimpanan dan penanganan berdasarkan cara yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan target dalam bauran pemasaran sebuah

perusahaan baik dalam perusahaan individual maupun sepanjang saluran distribusi (**Cannon 4:2008**).

Logistik adalah segala sesuatu yang berujud yang dapat digunakan untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar manusia yang habis pakai terdiri atas pangan, sandang dan papan atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang yang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya: sembako (sembilan bahan pokok), obat-obatan, pakaian dan kelengkapannya, air, kantong tidur (sleeping bag), perlengkapan bayi, perlengkapan keluarga (pembalut wanita, odol, sabun mandi, shampo, detergen, handuk).

Logistik adalah suatu ilmu pengetahuan, seni dan teknik perencanaan dari suatu produksi, penyimpanan, transportasi (pengangkutan), perpindahan personil, usaha mendapatkan persediaan dan perlengkapan seperti halnya konstruksi dan fasilitas penunjang bagi pengoperasian tepat guna untuk keberhasilan kemiliteran.

**(Subagja, 1990 :5)**

**Sondang P. Siagian, (1990 : 156)** mengatakan Aktivitas pembangunan yang semakin meningkat memerlukan adanya suatu sistem manajemen logistik yang benar-benar dapat menunjang lancarnya kegiatan pembangunan, maka perlu dilihat secara keseluruhan (Total System) yang deretan komponennya pada dasarnya terdiri dari :

1. Perencanaan Logistik
2. Pengadaan Logistik yang menimbulkan pertanyaan sentralisasi dan desentralisasi

3. Penyimpanan logistik yang juga berkisar pada masalah sentralisasi dan desentralisasi
4. Distribusi Logistik
5. Penggunaan Logistik
6. Penanggung jawab Logistik
7. Evaluasi Logistik

Menurut Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana, di jelaskan bahwa tahapan pengelolaan logistik dan peralatan, meliputi:

1. **Perencanaan/inventaris kebutuhan**, yaitu tahapan awal untuk mengetahui apa barang yang dibutuhkan, siapa yang membutuhkan, dimana, kapan dan bagaimana cara menyampaikan kebutuhannya. Dalam tahapan ini, kita juga harus mengetahui kondisi korban bencana yang akan ditanggulangi.
2. **Penerimaan/pengadaan**, yaitu tahapan diterimanya logistik dan peralatan, kemudian dilakukan pencatatan yang meliputi kategori: dari mana bantuan diterima, kapan diterima, apa jenis bantuannya, jumlahnya, cara menggunakan atau mengoperasikannya, apakah ada permintaan untuk siapa bantuan ini ditujukan.
3. **Pergudangan dan penyimpanan**, yaitu langkah dilaksanakannya penyimpanan barang. Sebelum logistik dan peralatan disimpan harus dilakukan pencatatan terlebih dahulu yang meliputi: jenis logistik dan peralatan apa saja yang dimasukkan ke dalam gudang, berapa jumlahnya,



bagaimana keadaannya, siapa yang menyerahkannya, siapa yang menerimanya. Cara penyimpanan menggunakan metoda barang yang masuk terlebih dahulu dikeluarkan pertama kali (first-in first-out) dan atau menggunakan metode last –in first out. Adapun prosedur penyimpanan dan pergudangan meliputi pemilihan tempat, tipe gudang, kapasitas dan fasilitas penyimpanan, serta sistem pengamanan dan keselamatan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. **Pendistribusian**, yaitu penyaluran logistik dan peralatan kepada korban. Sebelum logistik dan peralatan didistribusikan, harus disusun suatu perencanaan yang terdiri dari data: siapa saja yang akan menerima, prioritas bantuan logistik dan peralatan yang diperlukan, alat transportasi yang akan digunakan, dan siapa saja yang bertanggung jawab atas penyampaiannya.
5. **Pengangkutan**, berdasarkan data dari perencanaan pendistribusian, maka dilaksanakan tahapan selanjutnya, yaitu pengangkutan. Data yang dibutuhkan dalam pengangkutan adalah jenis logistik dan peralatan yang diangkut, jumlah, tujuan, siapa yang bertanggung jawab dipergudangan termasuk tanggung jawab dari segi keamanannya, dan siapa yang bertanggung jawab menyampaikan kepada penerima. Metode pengangkutan yang dilaksanakan didasarkan pada situasi darurat, kondisi wilayah yang dituju, kecepatan distribusi, tingkat efektifitas dan efisiensi, keamanan, keselamatan serta ketersediaan alat angkut.

6. **Penerimaan tujuan**, yaitu tahapan pada saat logistik dan peralatan telah sampai ditempat tujuan. Adapun hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: (1) mencocokkan antara data di manifest pengangkutan dengan jenis barang bantuan yang diterima, (2) memeriksa kembali jenis, jumlah, berat dan kondisi barang. (3) mencatat tempat pemberangkatan, tanggal waktu kedatangan, sarana transportasi, pengirim dan penerima barang, (4) membuat berita acara serah terima dan tanda bukti penerimaan.
7. **Penghapusan**, yaitu tahapan apabila logistik dan peralatan dialihkan kepemilikannya atau tidak dapat digunakan atau hilang atau musnah. Penghapusan dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang melalui proses penghapusan dan diakhiri dengan berita acara penghapusan.
8. **Pertanggungjawaban**, yaitu tahapan pertanggungjawaban terhadap penanggulangan bencana yang telah dilakukan baik dalam hal keuangan maupun kinerja, dilakukan pada setiap tahapan proses dan secara paripurna untuk seluruh proses, dalam bentuk laporan oleh setiap pemangku proses secara berjenjang dan berkala sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana menganut pola yang melibatkan sistem kelembagaan mulai dari tingkat Nasional, propinsi sampai Kota/Kabupaten. Dengan melaksanakan prosedur penyelenggaraan

logistik secara benar sesuai dengan ketentuan, kita berharap penyaluran logistik dan peralatan yang dibutuhkan korban bencana tidak lagi mengalami keterlambatan.

## **2.4 Mekanisme penyelenggaraan bantuan logistik**

Pengelolaan Bantuan Logistik mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana. Bantuan logistik penanggulangan bencana diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme sebagai berikut:

### **A. Perencanaan Bantuan Logistik**

1. Perencanaan bantuan logistik merupakan langkah awal untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan bantuan peralatan, baik jenis, jumlah, spesifikasi, waktu dan tata cara pendistribusian bantuan logistik.
2. Kebutuhan bantuan logistik dapat berasal dari permintaan BPBD Kabupaten/Kota dan BPBD Provinsi, atas dasar laporan kajian dari Tim Reaksi Cepat (TRC) dan inisiatif BNPB.
3. Permintaan bantuan logistik pada saat pra dan pasca bencana ditujukan sebagai stok penyangga (buffer stock) gudang-gudang BPBD Kabupaten/Kota, BPBD Provinsi dan UPT.
4. Permintaan bantuan logistik pada tahap tanggap darurat ditujukan untuk membantu pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital yang rusak akibat bencana.

## **B. Pengadaan Bantuan Logistik**

Pengadaan bantuan logistik dapat diklasifikasikan sesuai dengan tahapan bencana, sebagai berikut:

1. Pengadaan bantuan logistik bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat.
2. Pada saat pra dan pasca bencana pengadaan bantuan logistik dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Pada saat terjadi bencana, pengadaan logistik dilakukan dengan cara:
  - a. Pengadaan yang bersumber dari pengerahan bantuan logistik Instansi/Lembaga, Dunia Usaha dan Masyarakat .
  - b. Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus sesuai Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan melalui mekanisme Penunjukan Langsung.
  - c. BNPB menggunakan dana siap pakai yang dialokasikan dalam APBN.
  - d. BPBD dapat menggunakan dana siap pakai yang dialokasikan dalam APBD.
  - e. Bantuan logistik dari Luar Negeri dikoordinasikan oleh BNPB.

## **C. Pendistribusian Bantuan Logistik**

Distribusi bantuan logistik untuk penanggulangan bencana dilaksanakan dengan ketentuan dan berdasarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan kebutuhan dan permintaan bantuan, harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang di bidang penanggulangan bencana.
2. Data penerima bantuan, waktu pendistribusian, alat transportasi yang digunakan.
3. Inisiatif dari pejabat berwenang dalam penanggulangan bencana
4. Data penerima bantuan, waktu penyampaian, alat transportasi yang digunakan
5. Petugas pendistribusian menyampaikan bantuan logistik kepada penerima
6. Sisa bantuan logistik yang selesai digunakan diperlakukan dengan cara:
  - a. Dihilangkan kepemilikannya dan menjadi stok penyangga gudang di daerah.
  - b. Barang logistik yang dialihkan kepemilikannya atau tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan atau hilang atau musnah dapat dilakukan penghapusan. Penghapusan barang logistik harus memperhatikan kepada hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Penghapusan harus dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang melalui proses penghapusan dan diakhiri dengan surat keputusan penghapusan.
    - 2) Setelah dilakukan penghapusan dilanjutkan dengan berita acara pemusnahan.
    - 3) Penghapusan didasarkan kepada peraturan yang berlaku.

## **2.5 Pandangan islam dalam bidang distribusi**

Islam menetapkan kebebasan karena mengakui eksistensi manusia, mengakui fitrah mereka untuk menyembah Allah. Islam mengakui kemuliaannya dan keahliannya (skill yang dimilikinya). Karena itulah, kepada mereka Allah mengangkat manusia sebagai Khalifatullah (pelaksana tugas dari Allah) dimuka bumi ini.

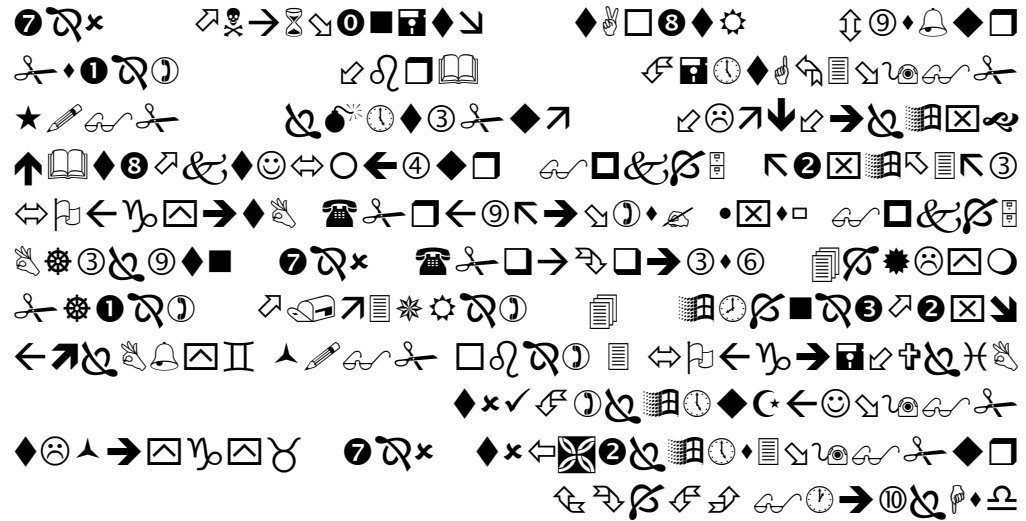
Ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, dan mengikuti politik terbaik dalam merealisasikan tujuan–tujuan tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa sistem distribusi ekonomi dalam ekonomi islam mempunyai andil bersama sistem dan politik syariah lainnya dalam merealisasikan beberapa tujuan umum syariat islam. Dimana tujuan distribusi dalam ekonomi islam di kelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi. Berikut ini hal yang terpenting kedalam tujuan tersebut adalah :

### **a. Pertama : Tujuan Dakwah**

Yang dimaksud dakwah disini adalah dakwah kepada islam dan menyatukan hati kepadanya. Diantaranya contoh yang paling jelas adalah bagian muallaf di dalam zakat, dimana muallaf itu adakalnya orang kafir yang diharapkan keislamannya atau dicegah keburukannya, atau orang islam yang di harapkan kuat keislamannya. Sebagaimana system distribusi dalam ghanimah dan fa'ijuga memiliki tujuan dakwah yang jelas.

Pada sisi lain, bahwa pemberian zakat kepada muallaf juga memiliki dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri.

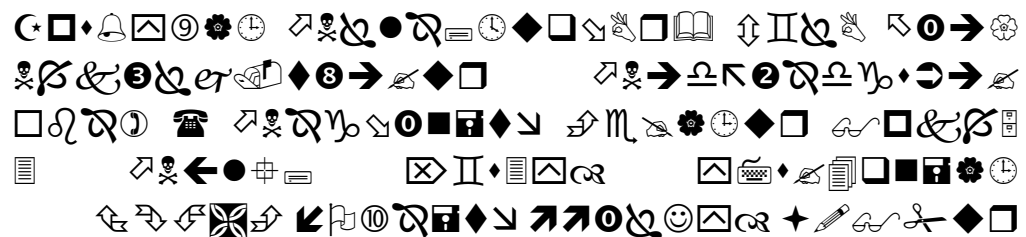
Sebab Allah berfirman pada Firman Allah QS Ali Imran: 140



“Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, Maka Sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada' dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim,”

## b. Kedua : Tujuan Pendidikan

Di antara tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti yang di sebutkan dalam firman Allah QS At-Taubah : 103



Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan<sup>[658]</sup> dan mensucikan<sup>[659]</sup> mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahu

Secara umum, bahwa distribusi dalam perspektif ekonomi islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, dimana yang terpenting adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma dan mengutamakan orang lain.
- b. Mensucikan dari akhlak tercela, seperti kikir, loba dan mementingkan diri sendiri (egois).

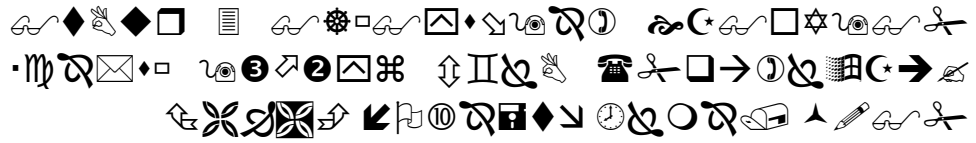
### c. Ketiga : Tujuan Sosial

Tujuan sosial terpenting dalam distribusi adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. Dapat di lihat pada Firman Allah QS Al Baqarah:273







(Berinfqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.”

2. Memperkuat ikatan cinta dan kasih sayang diantara individu dan kelompok di dalam masyarakat
3. Mengikis sebab – sebab kebencian dalam masyarakat, dimana akan berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat, sebagai contoh bahwa distribusi yang tidak adil dalam pemasukan dan kekayaan akan berdampak adanya kelompok dan daerah miskin, dan bertambahnya tingkat kriminalitas yang berdampak pada ketidaktentraman.
4. Keadilan dalam distribusi mencakup :
  - a) Pendistribusian sumber–sumber kekayaan
  - b) Pendistribusian pemasukan diantara unsur– unsur produksi

c) Pendistribusian diantara kelompok masyarakat yang ada, dan keadilan dalam pendistribusian diantara generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang.

**d. Keempat : Tujuan Ekonomi**

Distribusi dalam ekonomi islam mempunyai tujuan–tujuan ekonomi yang penting, dimana yang terpenting diantaranya dapat disebutkan seperti berikut ini :

1. Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib maupun sunnah, maka demikian itu akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat.
2. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Pada sisi lain, bahwa sistem distribusi dalam ekonomi islam dapat menghilangkan faktor–faktor yang menghambat seseorang dari andil dalam kegiatan ekonomi ; seperti utang yang membebani pundak orang – orang yang berhutang atau hamba sahaya yang terikat untuk merdeka. Karena itu Allah menjadikan dalam zakat bagian bagi orang-orang yang berhutang dan bagian bagi hamba sahaya.
3. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, di mana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan

tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara individu masyarakat. Karena itu kajian tentang cara distribusi yang dapat merealisasikan tingkat kesejahteraan ekonomi terbaik bagi umat adalah suatu keharusan dan keniscayaan.

Dapat kita lihat pada QS Al-Baqarah : 265

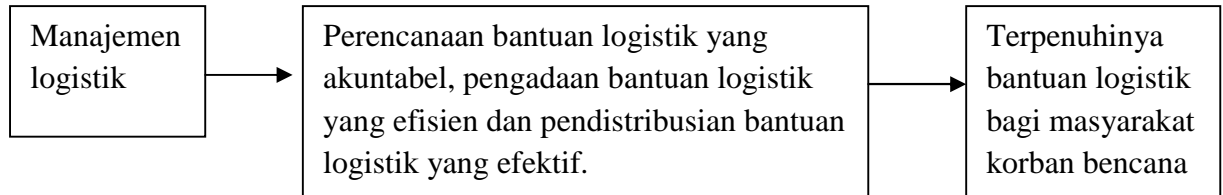


“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya Karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.”

Yang artinya dapat dimaknakan bahwasanya orang – orang yang membelanjakan hartanya karena keridhoaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka kepada iman dan ibadah – ibadah yang lain, sebagai bentuk pelatihan kepadanya, sehingga setiap manusia terus tetap bertakwa kepada Allah SWT.

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran yang digambarkan dapat dijelaskan bahwa manajemen logistik sangat penting, terkandung perencanaan bantuan yang akuntabel dimana harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat, pengadaan bantuan logistik yang efisien menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dengan waktu yang singkat serta pendistribusian bantuan logistik efektif yang harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang besar sehingga terpenuhi kebutuhan masyarakat korban banjir.

## 2.7 Konsep Oprasional

### a. Defenisi Konsep

Konsep-konsep yang telah dikemukakan diatas masih bersifat abstrak, maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk mempermudah penelitian, maka dimasukkan beberapa batasan untuk berpedoman kepada teori yang dikemukakan pada landasan teori. Defenisi konsep merupakan

pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan pada bagian berikutnya, yaitu dengan mendefinisikan sebagai berikut :

1. Pembangunan perencanaan daerah dalam konteks manajemen pembangunan merupakan fungsi pertama yang harus dilakukan. Perencanaan pembangunan daerah yang dikembangkan harus memiliki prinsip bersifat menyokong atau memperkuat perencanaan pembangunan secara nasional. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan sangat menentukan tercapainya hasil perencanaan yang baik. Karena masyarakat sebagai unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang dibutuhkannya. Disamping masyarakat seharusnya diberi kepercayaan oleh pemerintah dalam pembangunan, sehingga mereka merasa bertanggungjawab dan merasa memiliki program pembangunan tersebut. **(Riady 2003:336)**
2. Distribusi adalah pergerakan barang dari distributor hingga kepelanggannya **(David 22 :2009)**.
3. Logistik adalah pemindahan, penyimpanan dan penanganan berdasarkan cara yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan target dalam bauran pemasaran sebuah perusahaan baik dalam perusahaan individual maupun sepanjang saluran distribusi **(Cannon 4:2008)**.

## **b. Variabel Penelitian**

Unsur penelitian yang digunakan untuk mengukur suatu variable dalam penelitian ini, berdasarkan Peraturan Kepala BNPB No 13 Tahun 2008 yaitu Mekanisme Penyelenggaraan Bantuan Logistic yang mana dapat diuraikan bahwa indikator keberhasilan pendistribusian bantuan logistic sebagai berikut :

| Variabel                                   | Indikator                    | Sub Indikator   |
|--|------------------------------|---|
| Mekanisme Penyelenggaraan Bantuan Logistik | Perencanaan Bantuan Logistik | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Memenuhi kebutuhan logistic baik jenis, jumlah, spesifikasi, waktu dan tatacara pendistribusian bantuan logistic.</li><li>b. Permintaan bantuan logistic sebagai buffer stock/stock penyangga pada saat pra dan pasca bencana.</li><li>c. Penangan pada tahap tanggap darurat, untuk pencarian penyelamatan dan evakuasi korban serta pemulihan fungsi sarana dan perasarana vital yang rusak.</li></ul> |
|  | Pengadaan bantuan logistic   | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Bantuan bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.</li><li>b. Pelaksanaan pengadaan berdasarkan KEPRES No 80 Tahun 2003 yang dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan langsung.</li></ul>  |
|  | Pendistribusian              | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Alokasi pendistribusian</li></ul>  |

|  |                  |  |
|--|------------------|--|
|  | bantuan logistic | <p>melalui persetujuan pejabat yang berwenang dibidang penanggulangan bencana.</p> <p>b. Pendistribusian dilaksanakan berdasarkan data penerima bantuan, waktu serta alat transportasi yang digunakan.</p> |
|--|------------------|--|